



POTRET GEOGRAFIS KEMISKINAN DI PROVINSI BENGKULU: KOMPARATIF KEMISKINAN WILAYAH UTARA DAN SELATAN

Rihan Ifebri¹⁾, Reflis²⁾, Ellys Yuliarti³⁾, Sriyoto⁴⁾ Osronita⁵⁾

^{1,2,3,4)} Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Bengkulu

⁵⁾ Program Studi Geografi Universitas Tamansiswa Padang

Email: ^{1)} rihan03ifebri@unib.ac.id, ²⁾ reflis@unib.ac.id ³⁾ ellys.yuliarti@gmail.com,
⁴⁾ ekajuni216@gmail.com, ⁵⁾ osronita53@gmail.com

ABSTRACT

Multidimensional poverty research was carried out in districts/cities located in the coastal area of Bengkulu Province. This research aims to identify the intensity of poverty, identify multidimensional poverty, and identify the level of poverty deprivation in districts/cities in the coastal areas of Bengkulu Province. This research uses secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) of Bengkulu Province in the form of micro statistical data, namely National Socio-Economic Survey (SUSENAS) pooled cross-section data with a survey wave period of 2022. The method used is the Multidimensional Poverty Index (MPI) method, modified from Alkire and Foster. The results of the research are that the intensity of multidimensional poverty in the northern region, namely Muko-Muko district (15.28%) is lower than in the southern region, namely Kaur district (37.16%). The Multidimensional poverty rate (M) in the Northern region of Bengkulu Province, namely Muko-Muko Regency, is smaller (6.16%) compared to the Southern region of Bengkulu Province, namely Kaur Regency (16.98%). Household deprivation status according to multidimensional poverty indicators, namely the number of years of schooling, potable water and then the indicators of household calorie consumption and household protein consumption which contribute a lot to multidimensional poverty in the Northern region of Bengkulu Province, namely Muko-Muko Regency and the Southern Region of Bengkulu Province, namely Kaur District.

Keywords: Deprivation, Multidimensional Poverty, Region

1. PENDAHULUAN

Ketidakmampuan ekonomi merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap negara dan wilayah otonom di lingkungannya, terutama bagi negara-negara yang masih dalam tahap pengembangan. Kesepakatan global terkait masalah ini tergambar dalam sebuah dokumen yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs). Dokumen tersebut menguraikan target untuk memberantas kemiskinan, yang dapat diwujudkan melalui

komitmen pemerintah dalam bentuk program-program pengentasan kemiskinan.

Hingga saat ini, pemerintah telah mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan dengan fokus pada aspek moneter. Dalam konteks ini, seseorang dianggap miskin jika pendapatan atau pengeluarannya berada di bawah nilai yang telah ditetapkan (BPS, 2022). Meskipun demikian, kemiskinan sebenarnya bersifat multidimensi dan tidak hanya terbatas pada aspek pendapatan atau pengeluaran (Salam dkk., 2021). Oleh karena itu, diperlukan pengukuran kemiskinan yang

melibatkan berbagai dimensi untuk melengkapi pendekatan moneter.

Meskipun telah ada banyak penelitian yang membahas masalah kemiskinan, masih terdapat kekurangan dalam penelitian yang mengadopsi perspektif multidimensi untuk memahami fenomena ini. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Rimajuwikah (2021) terkait kemiskinan di tingkat desa telah mempertimbangkan tiga dimensi utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Meskipun demikian, perlu diingatkan bahwa aspek moneter tetap menjadi hal penting dalam konteks ini, karena pengukuran kemiskinan juga mencakup pengeluaran dan pendapatan nominal keluarga.

Melihat kemiskinan dari perspektif multidimensional memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi berbagai aspek dan sebaran geografis kemiskinan di berbagai wilayah. Provinsi Bengkulu, sebagai contoh, merupakan salah satu provinsi di semenanjung pesisir barat Pulau Sumatera yang juga mengalami fenomena kemiskinan. Tingkat kemiskinan dalam 5 tahun terakhir di provinsi ini tercatat cukup tinggi, terutama dengan penyebaran yang signifikan di tingkat kota/kabupaten.

Multidimensional Poverty Index (MPI) telah menjadi kebutuhan penting bagi Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. Dokumen ini menyampaikan pandangan bahwa masalah kemiskinan memiliki dimensi yang beragam, tidak hanya terbatas pada aspek pendapatan, tetapi juga mencakup peluang kerawanan dan kerentanan individu atau kelompok masyarakat terhadap kondisi kemiskinan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Bappenas], 2007). Untuk mendukung pandangan ini, diperlukan berbagai penelitian yang dapat mengukur

tingkat kemiskinan secara serentak di Indonesia, menggunakan metode pengukuran Multidimensional Poverty Index (MPI).

Konsep kemiskinan multidimensi, seperti yang diuraikan oleh Rimajuwikah et al. (2021), menggambarkan kemiskinan sebagai permasalahan yang dapat diukur dengan cakupan yang luas dan kompleks. Multidimensional Poverty Index (MPI) telah diarahkan untuk sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga setiap indikatornya menjadi bagian integral dari pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) (Alkire & Foster, 2011).

Sejumlah penelitian menunjukkan konsensus bahwa kemiskinan merupakan fenomena sosial yang memiliki dimensi beragam. Dalam konteks ini, mobilitas sosial dan indikator kesejahteraan, seperti jenis kelamin, usia, kekayaan, budaya, standar hidup, pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan faktor lainnya, telah diidentifikasi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan (Tedong et al., 2022). Selain dipengaruhi oleh faktor material, kemiskinan juga dipengaruhi oleh berbagai aspek kesejahteraan dan pengalaman masyarakat.

Keberadaan fenomena krusial ini menimbulkan kekhawatiran di tingkat internasional, terutama karena hingga saat ini belum ada standar internasional yang secara tepat dapat mendefinisikan gambaran kemiskinan (Pérez-Calderón, 2022).

Penelitian yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa hasil pengukuran kemiskinan secara moneter sering kali berbeda jika dibandingkan dengan situasi yang dialami oleh penduduk yang dianggap miskin. Contoh nyata adalah temuan bahwa 13% dari rumah tangga di Montevideo, Uruguay, dinyatakan sebagai penduduk dengan pendapatan yang rendah, tetapi mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebaliknya, 7,5%

dari rumah tangga menghadapi situasi sebaliknya, di mana meskipun tidak dianggap sebagai penduduk miskin secara moneter, namun mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka (Alkire et al., 2020; Alkire & Foster, 2009, 2011).

Fenomena pengurangan jumlah penduduk miskin yang dialami oleh Indonesia juga termanifestasi di Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu, yang sebagian besar wilayahnya terletak di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera, terdiri dari 10 Kota/Kabupaten. Mata pencaharian utama di provinsi ini terfokus pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan kontribusi yang lebih rendah dari sektor lainnya. Meskipun demikian, selama beberapa tahun terakhir, penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu terbilang minim. Pada tahun 2022, persentase penduduk miskin mencapai 14,48%, menunjukkan penurunan hanya sebesar 0,35% dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 adalah 298.895 ribu jiwa, mengalami penurunan yang sedikit menjadi 294.780 ribu jiwa.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi Bengkulu sangat kompleks. Dengan luas wilayah mencapai 19.919 km² dan jumlah penduduk hanya sekitar 102 jiwa/km², angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar yang diberikan oleh WHO, yang menetapkan kepadatan penduduk normal sekitar 9.600 jiwa per km² (Abraham et al., 2014). Kondisi ini menjadikan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi termiskin ketujuh dari total 34 provinsi di Indonesia (Statistik Bengkulu, 2022).

Kemiskinan tidak hanya dapat diukur melalui pendapatan dan pengeluaran nominal, melainkan juga melalui berbagai dimensi lain yang berperan penting dalam memastikan kelangsungan hidup dan daya dukung rumah

tangga menuju kesejahteraan. R.S. Pindyck menyatakan bahwa kesejahteraan bertindak sebagai lawan atau kontras dari kondisi kemiskinan yang dialami oleh seseorang (Nuryitmawan, 2016). Penilaian tingkat kesejahteraan mencerminkan dua pendekatan yang berorientasi pada pembangunan yang berbeda.

Kelompok pertama menilai kesejahteraan dengan memperhitungkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan per kapita. Di sisi lain, kelompok kedua melihat kesejahteraan sebagai sesuatu yang harus dinilai dari perspektif pembangunan manusia. Pandangan ini, yang diusung oleh kelompok kedua, berfokus pada kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara, dengan melakukan pengukuran kesejahteraan dari berbagai aspek yang melibatkan manusia.

Selama ini, pengukuran kemiskinan terbatas pada indikator moneter seperti pendapatan atau konsumsi, yang sering disebut sebagai pengukuran kemiskinan unidimensi. (World Bank 2018). Hal ini menghasilkan ukuran kemiskinan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya (Abdullah et al., 2019). Menilai kemiskinan di Provinsi Bengkulu dapat diilustrasikan melalui contoh geografis wilayah tersebut. Sebagai contoh, wilayah paling utara Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Muko-muko, sementara wilayah paling selatan adalah Kabupaten Kaur. Dari segi geografis, kedua wilayah ini dapat dianggap sebagai studi kasus kemiskinan di Provinsi Bengkulu, mengingat kedua wilayah tersebut merupakan pintu masuk utama ke Provinsi Bengkulu.

2. METODOLOGI

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh tidak langsung melalui data mentah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu. Penggunaan data

dalam penelitian ini bersumber dari statistik mikro, yakni data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pooled cross-section pada periode gelombang survei tahun 2022. Data ini mencakup informasi individu dan rumah tangga di sektor pertanian pada tingkat provinsi.

Analisis data kemiskinan dilakukan dengan merujuk pada metode Alkire-Foster (metode AF) yang telah dimodifikasi secara multidimensi. Langkah-langkah pengukuran kemiskinan multidimensi dengan metode Alkire-Foster, sesuai dengan pandangan Alkire & Foster (2011) dan Haris (2017), dapat diuraikan sebagai berikut: Memilih unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini rumah tangga.

1. Memilih dimensi kemiskinan
2. Memilih indikator pada masing-masing dimensi
3. Menetapkan *cut off* deprivasi masing-masing indikator, Indikator yang terdeprivasi diberikan skor 1, sebaliknya indikator yang tidak terdeprivasi diberikan skor 0.
4. Menentukan bobot (w_i) setiap dimensi/indikator
Menurut metode AF, setiap dimensi MPI diberikan bobot dengan metode rata-rata, sehingga diperoleh nilai bobot yang sama untuk setiap dimensi. Selanjutnya, metode rata-rata juga digunakan untuk mendapatkan bobot masing-masing indikator pada setiap dimensi, sehingga setiap indikator dalam satu dimensi yang sama memiliki nilai bobot yang sama, namun bisa berbeda dengan indikator pada dimensi yang lain
5. Menghitung skor deprivasi ($\sum C_i$) yang dialami rumah tangga.

$$\sum C_i = w_1I_1 + w_2I_2 + w_3I_3 + \dots + w_dI_d, \text{ di mana } I_1 = 1 \text{ jika rumah tangga terdeprivasi pada indikator ke-}i \text{ dan } I_1 = 0 \text{ jika rumah}$$

tangga tidak terdeprivasi pada indikator ke- i .

6. Menentukan rumah tangga miskin dan tidak miskin dengan skor total deprivasi. Rumah tangga disebut miskin multidimensi jika total skor deprivasi ($\sum C_i$) lebih dari atau sama dengan 0,33. Namun jika skornya kurang dari 0,33 maka didefinisikan tidak miskin.
7. Mendekomposisi kemiskinan dengan menghitung proporsi penduduk miskin (*multidimensional poverty headcount*) di setiap wilayah (H).
$$H = \frac{q}{n}$$

Dimana :
 q = jumlah penduduk miskin multidimensi
 n = jumlah penduduk total.
8. Menghitung average deprivation shared among poor (A) atau intensitas kemiskinan yang dialami oleh rumah tangga miskin.
$$A = \frac{\sum_{i=1}^q C_i}{q}$$
9. Menghitung indeks kemiskinan multidimensi (M_0).
$$M_0 = H \times A$$
10. Mendekomposisikan angka kemiskinan multidimensi
Angka kemiskinan multidimensi dapat didekomposisikan dan dianalisis lebih lanjut menurut status daerah tempat tinggal rumah tangga, dan lain sebagainya sesuai kecukupan data yang tersedia
11. Menginterpretasikan output
Langkah terakhir adalah menginterpretasikan hasil penghitungan kemiskinan multidimensi secara deskriptif disertai gambar (grafik) agar lebih jelas dan mudah dipahami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Intensitas Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan Multidimensi

Dimensi Kemiskinan menurut Alkire-Foster melibatkan Pendidikan, Kesehatan/Nutrisi, dan Standar Hidup. Dari dimensi-dimensi tersebut, beberapa indikator dan variabel yang merepresentasikan dimensi tersebut dipilih. Proses pemilihan indikator/variabel, titik potong (cut-off) untuk setiap indikator kemiskinan, pembobotan untuk setiap dimensi/indikator, dan second cut-off mengacu pada penelitian Alkire dan Santos (2010), serta mempertimbangkan ketersediaan data dari SUSENAS dengan beberapa modifikasi. Dalam penelitian ini, dimensi moneter diubah menjadi indikator sebagai bagian dari modifikasi, mengingat ukuran pekerjaan, pendapatan, dan biaya pengeluaran dihitung dalam bentuk moneter (Nurwati, 2008). Indikator kemiskinan diukur dengan memperhatikan persentase penduduk miskin multidimensi, dan dua indikator tambahan yang dihasilkan adalah intensitas kemiskinan multidimensi (A), yang mengukur rata-rata deprivasi yang dialami oleh individu miskin, dan Adjusted Multidimensional Poverty Headcount Ratio (M0), yang menyesuaikan tingkat kemiskinan multidimensi dengan intensitasnya (A).

Tabel.1 Indikator Kemiskinan Multidimensi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

No	Kota / Kabupaten (1)	H (%) (2)	A (%) (3)	M (%) (4)
1	Muko-Muko	40,32	15,28	6,16
2	Kaur	45,69	37,16	16,98

Sumber: Data Olah Susenas, 2022

Pada tahun 2022 (Tabel 1), terdapat ketidakseimbangan intensitas kemiskinan multidimensi antara kabupaten/kota di Wilayah Utara dan Wilayah Selatan Provinsi Bengkulu. Sebagai contoh, Kabupaten

Muko-Muko memiliki tingkat intensitas sebesar 15,28%, yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Kaur yang mencapai 37,16%. Semakin tinggi nilai A, semakin besar jumlah deprivasi yang dialami oleh individu miskin. Dengan demikian, berdasarkan perbandingan tersebut, wilayah Selatan, khususnya Kabupaten Kaur, menunjukkan tingkat deprivasi yang lebih signifikan dibandingkan dengan wilayah Utara, khususnya Kabupaten Muko-Muko.

Kejadian ini terjadi karena pada suatu wilayah, penyebaran jumlah penduduk tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang positif di daerah tersebut. Fenomena ini juga sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh A dan rekan-rekan (2020) yang dinamis terkait kemiskinan di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan situasi faktual dimana penyebaran jumlah penduduk di suatu wilayah sesuai dengan rasionalitas yang didasarkan pada kondisi kemiskinan di Indonesia. Meskipun jumlah penduduk besar, pertumbuhan ekonomi masih mengalami perlambatan, bahkan meskipun angka kemiskinan menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan informasi dari Bappeda DIY & BPS DIY (2016) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY (Prastya & Kusumaningrum, 2016), tingkat kemiskinan yang rendah dapat dianggap sebagai ciri dari kemiskinan yang bersifat kronis di suatu daerah.

Tingkat kemiskinan Multidimensi (M) seperti tergambar dalam Tabel 2 menunjukkan bahwa di Provinsi Bengkulu, wilayah Selatan, khususnya Kabupaten Kaur, memiliki persentase rumah tangga miskin tertinggi, yakni sebesar 16,98%,

sedangkan di wilayah Utara, khususnya Kabupaten Muko-Muko, angkanya lebih rendah, mencapai 6,16%. Analisis ini dapat diuraikan lebih rinci dengan merinci kontribusi dimensi indikator terhadap tingkat kemiskinan di setiap wilayah Kota/Kabupaten.

Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2018), yang menunjukkan bahwa masalah kemiskinan tidak selalu terkait dengan tingkat pendapatan, karena rumah tangga dengan pendapatan tinggi belum tentu memiliki kualitas hidup yang lebih baik dalam aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, atau standar kehidupan lainnya.

Penting juga untuk memeriksa dengan cermat situasi di Kabupaten Muko-Muko, dimana tingkat kemiskinan relatif rendah. Namun, perhatian harus diberikan pada faktor-faktor seperti jumlah penduduk, akses ke pendidikan, dan standar hidup termasuk kondisi infrastruktur jalan dan penyediaan air bersih. Nuryitmawan (2016) juga menyatakan bahwa dalam konteks kemiskinan multidimensional, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi miskin melibatkan lingkup yang lebih luas, tidak hanya dilihat dari perspektif pengeluaran konsumsi atau pendapatan individual.

Status Deprivasi Kabupaten/Kota Wilayah Utara dan Selatan Provinsi Bengkulu

Status deprivasi rumah tangga dapat mengidentifikasi indikator mana yang memiliki kontribusi paling signifikan terhadap tingkat kemiskinan multidimensi. Informasi ini memiliki relevansi penting sebagai dasar untuk merancang program percepatan pengentasan kemiskinan di suatu wilayah. Penelitian ini menghasilkan temuan

bahwa dengan memasukkan dimensi kemiskinan moneter, khususnya pengeluaran per kapita per bulan rumah tangga, bukanlah faktor utama yang menyumbang pada tingkat kemiskinan multidimensi. Sebaliknya, dengan tidak mengesampingkan kemiskinan moneter sebagai aspek dari multidimensi, kita memahami bahwa pengeluaran atau konsumsi tetap memiliki peran krusial dalam menentukan faktor-faktor kemiskinan.

Tabel.2 Status Deprivasi Kemiskinan Menurut Wilayah di Provinsi Bengkulu

Status Deprivasi	Muko-Muko(%)		Kaur (%)	
	D	TD	D	TD
Miskin Moneter	5,17	94,83	14,97	85,03
Konsumsi Kalori RT	10,34	89,66	5,37	94,63
Konsumsi Protein RT	18,60	81,40	12,15	87,85
Partisipasi Sekolah	1,29	98,71	0,28	99,72
Lama Sekolah	55,30	44,70	56,21	43,79
Sanitasi	8,27	91,73	11,02	88,98
Air Layak Minum	34,63	65,37	53,11	46,89
Sumber Penerangan	0,26	99,74	0,85	99,15

Sumber: Data Olah Susenas, 2022

Tabel 2. menunjukkan persentase status deprivasi rumah tangga menurut indikator kemiskinan multidimensi pada Wilayah Utara dan Selatan Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2022 tampak bahwa rumah tangga pada Wilayah Utara Provinsi Bengkulu Kabupaten Muko-muko paling banyak terdeprivasi pada indikator lama sekolah, air layak minum dan berikutnya indikator Konsumsi kalori dan protein. Kemudian untuk wilayah Selatan yaitu Kabupaten kaur yang paling banyak terdeprivasi yaitu Lama Sekolah, Air Layak Minum, Kemiskinan Moneter dan Konsumsi Protein.

Indeks Lama Sekolah mencerminkan dimensi Pendidikan dengan tingkat deprivasi yang signifikan di wilayah utara dan selatan Provinsi Bengkulu, yang melebihi 50%. Indeks ini merujuk pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 4, yang bertujuan

untuk memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas serta memberikan peluang belajar seumur hidup bagi semua. Salah satu target SDG 4 adalah memastikan bahwa semua anak, baik perempuan maupun laki-laki, menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara, dan berkualitas. Dalam konteks penelitian ini, sebuah rumah tangga dianggap mengalami deprivasi pada indikator Lama Sekolah jika ada anggota rumah tangga berusia kelas 9 (15 tahun) atau lebih yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar.

Menurut Gunther (2007), Pendidikan menjadi kunci penting bagi anggota rumah tangga untuk keluar dari kondisi kemiskinan, karena pendidikan memiliki potensi untuk mengubah paradigma berpikir dan mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, Pendidikan dianggap sebagai inti dari sumber daya manusia untuk menghasilkan nilai tambah kemampuan (Guo et al., 2022).

Indeks Air Bersih yang layak merupakan bagian dari dimensi Standar Kehidupan, dengan tingkat deprivasi yang cukup tinggi di wilayah Selatan, khususnya Kabupaten Kaur, yang mencapai 53,11%, dan Kabupaten Muko-Muko sebesar 34,63%. Indeks ini merujuk pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) nomor 6, yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi yang memadai bagi semua. Dalam konteks indikator ini, suatu rumah tangga dianggap mengalami deprivasi jika tidak memiliki akses ke air minum yang layak. Hal ini terjadi ketika sumber air minum berasal dari sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, air hujan, atau sumber air lainnya, dan jarak antara tempat penampungan limbah akhir dengan sumber air utama kurang dari sepuluh meter. Jika dimensi Standar Kehidupan yang sangat

rendah turut berperan dalam menyumbang pada kondisi kemiskinan, ini dapat didefinisikan sebagai situasi di mana seseorang atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia (Rahman, 2019).

Indeks Konsumsi Kalori dan Indeks Konsumsi Protein rumah tangga menunjukkan tingkat deprivasi yang cukup tinggi di wilayah Utara dan Selatan Provinsi Bengkulu, terutama di Kabupaten Muko-Muko, di mana nilai-nilainya melebihi 10% untuk konsumsi protein dan kalori rumah tangga. Sementara itu, di wilayah Selatan, khususnya Kabupaten Kaur, deprivasi hanya terjadi pada konsumsi protein rumah tangga dengan nilai yang melebihi 10%. Kekurangan asupan protein dalam jangka waktu yang lama dapat memperburuk kondisi, seperti stunting pada balita dan kekurangan nutrisi pada remaja, ibu hamil atau menyusui, serta lansia. Oleh karena itu, diperlukan program pengentasan kemiskinan yang dapat mencapai target-target internasional terkait masalah gizi buruk, sebagaimana disepakati dalam penelitian oleh Salam dan rekan-rekannya (2022).

Indikator lainnya pada berbagai dimensi di setiap kabupaten/kota di wilayah utara dan selatan Provinsi Bengkulu masih menunjukkan tingkat deprivasi yang cukup tinggi, meskipun angkanya berada di bawah 15%. Contohnya, indikator moneter mencapai 14,97%, dan sanitasi mencapai 11,02%, dengan tingkat deprivasi tertinggi terdapat di Kabupaten Kaur, sementara Kabupaten Muko-Muko memiliki tingkat deprivasi yang lebih rendah daripada Kabupaten Kaur.

Secara keseluruhan, dari gambaran wilayah utara dan selatan Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Kaur, terlihat bahwa tingkat deprivasi secara multidimensi lebih tinggi di Kabupaten Kaur. Penelitian oleh Priseptian

dkk (2022) menunjukkan bahwa indikator moneter biasanya digunakan sebagai metrik dalam mengukur kemiskinan, namun hal tersebut tidak bisa menjadi ukuran pasti untuk kemiskinan karena hanya mengukur salah satu variabel, yakni pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan dimensi lain untuk menilai aksesibilitas rumah tangga dalam mencapai tingkat kehidupan yang layak.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Intensitas kemiskinan multidimensi di wilayah Utara, khususnya Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu, menunjukkan tingkat yang lebih rendah jika dibandingkan dengan wilayah Selatan, terutama Kabupaten Kaur. Dalam hal kemiskinan multidimensi (M), Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu di wilayah Utara memiliki intensitas yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kaur di wilayah Selatan. Status deprivasi rumah tangga, jika dilihat dari indikator kemiskinan multidimensi, menunjukkan bahwa wilayah Utara dan Selatan paling banyak mengalami deprivasi pada indikator lama sekolah, air layak minum, dan selanjutnya pada indikator Konsumsi kalori rumah tangga dan Konsumsi protein rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. F., Othman, A., & Jani, R. (2019). Pengukuran kesejahteraan hidup Orang Asli menggunakan indeks kemiskinan multidimensi. In *Akademika*.
- Abraham, Razii, et all (2014). *Visa Masuk Kota: alternatif kebijakan kaum urban untuk mengatasi kepadatan penduduk Jakarta*. PKM-GT Kemenristek Dikti.
- Alkire, S., Dirksen, J., Nogales, R., & Oldiges, C. (2020). Multidimensional Poverty and COVID-19 Risk Factors: A Rapid Overview of Interlinked Deprivations across 5.7 Billion People. April, 1–8.
- Alkire, S., & Foster, J. (2009). Ophi working paper no. 32 Counting and Multidimensional Poverty Measurement.
- Alkire, S., dan Santos, M. E. (2010). Acute Multidimensional Poverty: A New Index for Developing Countries. In *Human Development Research Paper 2010/2011*. UNDP.
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Understandings and misunderstandings of multidimensional poverty measurement. 289–314. <https://doi.org/10.1007/s10888-011-9181-4>
- Bappeda DIY, & BPS DIY. (2016). *Laporan Akhir Analisis Kemiskinan Multidimensi dan Ketahanan Pangan di DIY*. 1–72.
- Bappenas. (2007). *Naskah Kebijakan : Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Nasional tentang Rencana Strategis Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Nasional Tahun 2020-2025*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Provinsi Bengkulu*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu: <https://bengkulu.bps.go.id/indicator/6/82/4/pengeluaran-pendapatan.html>
- Gunther, Isabel. (2007). *Empirical Analysis of Poverty Dynamics With Case Studies from Sub-Saharan Africa*. Peter Lang. Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Guo, J., Qu, S., & Zhu, T. (2022). Estimating China's relative and multidimensional Poverty: Evidence from micro-level data of 6145 rural households. *World Development Perspectives*, 26 (April), 100402. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2022.100402>
- Haris, M. (2017). Penghitungan Kemiskinan Multidimensi. *Jurnal Paradigma (JP)*. <https://ocs.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/view/436>
- Indriani, Lestari., Setyono (2018). *Analisis Kemiskinan Multidimensi Di Provinsi*

- Jawa Tengah 2011-2013. *Jurnal Aplikasi Statistik dan Komputasi Statistik (JP)*. Vol 10 Nomor 2, 13-24.
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran , Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1–11.
- Nuryitnawan, T. R. (2016). Studi Komparasi Kemiskinan Di Indonesia: Multidimensional Poverty Dan Monetary Poverty. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 1(1), 33–41. <https://doi.org/10.20473/jiet.v1i1.1847>
- Pérez-Calderón, E. (2022). Perceived Rural Development in UNESCO Global Geoparks in Spain. *Land*, 11(7). <https://doi.org/10.3390/land11071086>
- Prastya, D. P., & Kusumaningrum, R. (2016). Implementasi metode backpropagation dan interpolasi data dalam peramalan harga daging sapi dalam negeri. *Jurnal litbang* <Http://ejournal.bappeda.jatengprov.go.id/index.php/jurnaljateng/article/view/383>
- Priseptian, dkk. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Jurnal forum ekonomi*, vol 24 nomor 1, 45–53.
- Rahman, p. A. (2019). Kemiskinan dalam prespektif ilmu sosiologi. *Jurnal pendidikan tambusai*, 3 nomor 6, 1542–1548.
- Rimajuwikah, n. K., ari, i. R. D., & ... (2021). Analisis kemiskinan multidimensi di desa duwet kecamatan tumpang. *Planning for urban* <Https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/42>
- Salam, a., pratomo, d. S., & ... (2021). Analisis kemiskinan pada rumah tangga di jawa timur melalui pendekatan multidimensi dan moneter. In *jurnal* <Ejurnal.kependudukan.lipi.go.id>. <Https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/480>
- Statistik bengkulu. (2022). Provinsi bengkulu dalam angka 2022. Bps provinsi bengkulu.
- Tedong, p. A., abdullah, m. F., & jani, r. (2022). Multidimensional poverty and wellbeing of iban community in east malaysia. *Asia pacific journal of social work and development*, 32(2), 113–130. <Https://doi.org/10.1080/02185385.2021.2014352>
- World bank. (2018). Poverty and shared prosperty: piecing together the poverty puzzle. In the world bank group.